

**ANALISIS *SIYASAH SYAR'IIYAH* TENTANG AKSI DEMONSTRASI  
TERHADAP PEMERINTAH YANG BERDAULAT  
(Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**AYU SARAH  
NPM. 1621020290**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS *SIYASAH SYAR'IIYAH* TENTANG AKSI DEMONSTRASI TERHADAP  
PEMERINTAH YANG BERDAULAT**

(Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**AYU SARAH  
NPM. 1621020290**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iiyah*)**

**Pembimbing I**

**: Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II**

**: Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/ 2020M**

## ABSTRAK

### Analisis *Siyasah Syar'iyah* tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat

(Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)

Demonstrasi adalah salah satu bentuk komunikasi dalam partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok atau beberapa orang yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu kebijakan pemerintah. Aksi demonstrasi sering terjadi sepanjang tahunnya, khususnya di Indonesia demonstrasi menjadi lokomotif yang digemari rakyat secara umum sebagai sarana dalam memprotes terhadap berbagai problematika publik. Islam sendiri membolehkan aksi protes dalam perkara hukum (politik) maupun non hukum (non-politik). Namun tidak semua negara memperbolehkan aksi demonstrasi, dan juga demonstrasi terkadang ada mudharatnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi terkait hukum dibolehkan atau tidaknya berdemo dalam pandangan hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat?; 2) bagaimana *istinbath* hukum Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi dalam menetapkan fatwanya? 3) bagaimana analisis *siyasah syar'iyah* pada fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) fatwa Abdul Aziz bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat. 2) *istinbath* hukum Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi dalam menetapkan fatwanya. 3) analisis *siyasah syar'iyah* pada fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan cara berfikir deduktif dan metode komperatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Perbedaan pendapat terjadi karena perbedaan sistem yang diterapkan pada tiap negara, pro-kontra antar ulama terkait hukum boleh atau tidaknya demonstrasi. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz menyatakan bahwa demonstrasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemerintahan yang sah sehingga merupakan jenis *bughat* (memberontak) dan karenanya dihukumi haram serta pelakunya bisa dijatuhi hukuman berat. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi menganggap demonstrasi sebagai tindakan yang dihalalkan secara syariat, karena termasuk seruan dan ajakan kepada perubahan (yang lebih baik) serta sebagai sarana untuk saling mengingatkan tentang haq, juga sebagai kegiatan amar makruf nahi munkar. Adapun *istinbath* hukum yang digunakan oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz adalah metode normatif didalam proses *ijtihad*nya berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan, Yusuf Al-Qaradawi dalam hal ini menggunakan metode normatif-mashlahat berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Demonstrasi digunakan masyarakat sebagai sarana dakwah (*amar makruf nahi munkar*) terhadap masyarakat luas atau terhadap penguasa atau justru untuk aksi kejahatan, tergantung aktor yang memainkannya. Islam membolehkan gerakan massa yang tidak menimbulkan kerusakan. Dikarenakan, apapun yang menimbulkan mudharat tidak dibenarkan, meskipun tujuannya adalah untuk menghilangkan kezaliman.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131*

---

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Ayu Sarah  
NPM : **1621020290**  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Analisis Siyasah Syar'iyah tentang Aksi Demonstrasi Terhadap Pemerintah Yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 05 Mei 2020

Yang Menyatakan,



**AYU SARAH**  
**NPM. 1621020290**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Ayu Sarah

NPM : 1621020290

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Siyasah Syar'iyah tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi).

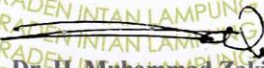
**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 04 Mei 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197012282000031002

  
Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan,

  
Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul: **Analisis Syarah Syar'iyah tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)**, disusun oleh Nama: **AYU SARAH**, NPM: **1621020290**, Program Studi: **HUKUM TATA NEGARA (Syarah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munqasyas Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Senin, 29 Juni 2020**.

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua: Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Sekretaris: Fathul Mu'in, S.H., M.H.I.

Penguji I: Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II: Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Kholidin, M.H.  
196210211993031002



## MOTTO

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*“Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu lakukanlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.”*

[HR. Muslim:49/78]



## PERSEMBAHAN

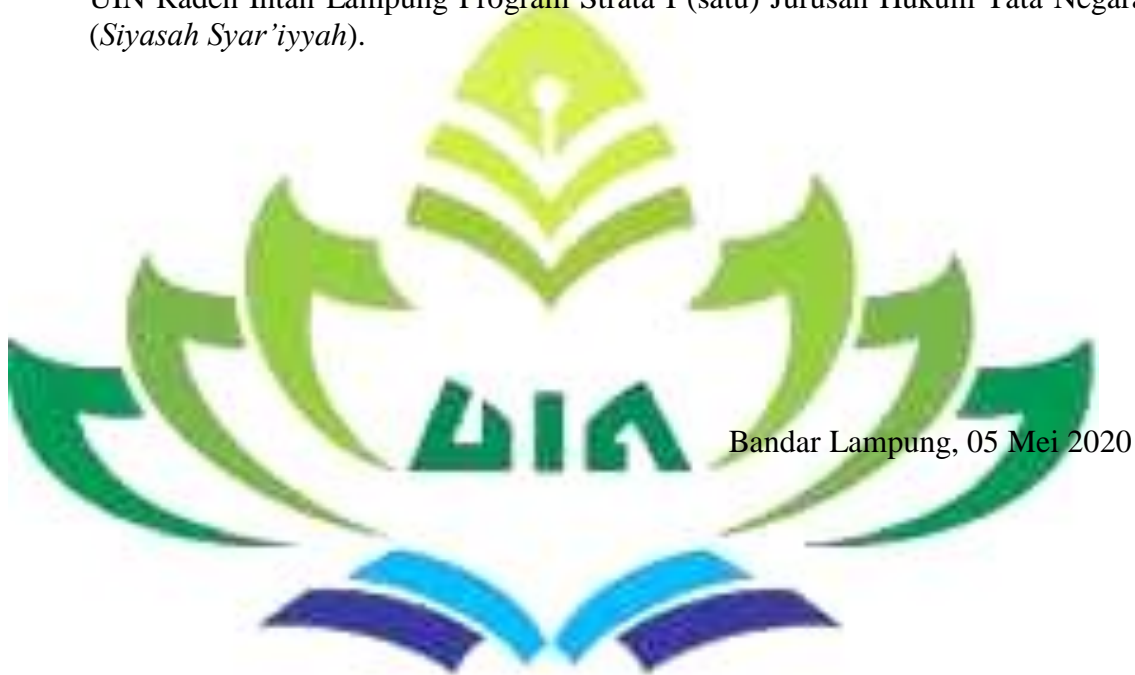
Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Suryadi Abdul Hadi Danial (Abi tersayang), beliau pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku,
2. Hj. Sulhayati (Umi tersayang), beliau seseorang yang tulus menyayangiku sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluhan kesahku, beliaulah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
3. Kakak-kakak dan adik-adik yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan support nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
4. Soni Saputra (Best Partner), terimakasih telah mengiringi serta mensupportku dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih juga selama ini menjadi pelampiasanku kalau lagi emosi dan selalu sabar walau kadang dia bikes, u're ma ironman the best of superhero everywhere and everytime.
5. Teman-teman seperjuangku di Angkatan 16 khususnya Jurusan Hukum Tata Negara terima kasih atas kegilaan yang sering kita jalani selama kita kuliah.
6. Chintya, Dimas, Nabila, Dewi, Fivi, Nevla (Sobat Yangti Tercinta), terimakasih atas suka duka bersama selama ini, saling support dan membantu satu sama lain, sukses untuk kita semua. See u all dimasa depan!!
7. Noor Rani, Keni, Selvi yang selalu memberi support.
8. Dewi, Erna, Rini, Uti, Dhenny, dan semua teman KKN terimakasih yang sampai sekarang menjadi teman baik, walaupun kalian setengah gila setengah waras, aku sangat mencintai kalian. Tapi boong!!
9. Para dosen dan staff di kampus yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan skripsi.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Ayu Sarah lahir di Desa Priyayi Kecamatan Kasemen Kabupaten Cilegon, pada tanggal 08 Mei 1999. Anak keempat dari sepuluh saudara dari pasangan bapak Suryadi Abdul Hadi Danial dan ibu Sulhayati. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri Terwana 2004-2010, Kemudian dilanjutkan pada Mts Alkhairiyah 2010-2013, dilanjutkan sekolah MAN 2 Bandar Lampung 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



Bandar Lampung, 05 Mei 2020

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Siyasah Syar'iyah Tentang Aksi Demonstrasi Terhadap Pemerintah Yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. Selaku ketua sidang munaqosyah yang dimana telah memimpin jalannya persidangan sehingga dapat berjalan lancar.
5. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. Selaku penguji I pada sidang Munaqasyah yang telah memberikan arahan dan nasehat-nasehat guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag Selaku pembimbing I sekaligus sebagai penguji II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing II sekaligus sebagai penguji III yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
9. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasi skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.



11. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Mei 2020  
Penulis,

AYU SARAH  
NPM. 1621020290



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penjelasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Demonstrasi.....	15
1. Pengertian Demonstrasi. ....	15
2. Sejarah Demonstrasi di Dunia.....	17
3. Sejarah Praktik Demonstrasi dalam Islam .....	28
4. Menyikapi Pemerintah yang Zhalim dalam Pandangan Islam.....	37
5. Demonstrasi dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah.....	42
B. Bentuk, Faktor dan Akibat Demonstrasi .....	50
1. Bentuk Demonstrasi .....	50
2. Faktor Demonstrasi .....	56
3. Akibat Demonstrasi.....	58
<b>BAB III : FATWA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAAZ DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG AKSI DEMONSTRASI TERHADAP PEMERINTAH TANG BERDAULAT</b>	
A. Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz .....	60
1. Biografi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz.....	60
2. Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat .....	69
B. Fatwa Yusuf Al-Qaradawi .....	78
1. Biografi Yusuf Al-Qaradawi .....	78
2. Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat.. .....	85



#### **BAB IV : ANALISA DATA**

- A. Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat.. .....92
- B. *Istinbath* Hukum Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi dalam Menetapkan Fatwanya.....99
- C. Analisis *Siyasah Syar'iyah* Pada Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat ..... 109

#### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 114
- B. Saran..... 116

#### **DAFTAR PUSTAKA.....117**

#### **LAMPIRAN.....121**

- Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Lampiran 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789
- Lampiran 3 Kartu Konsultasi
- Lampiran 4 Turnitin



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan dari kata-kata yang terkandung pada judul. Adapun judul skripsi ini yaitu **“Analisis *Siyasah Syar’iyyah* tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat** (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)” kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>1</sup>
2. *Siyasah Syar’iyyah*, menurut Abdurrahman Taj adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Quran maupun Sunnah.<sup>2</sup>
3. Aksi Demonstrasi adalah tindakan yang dilakukan sekelompok orang dengan dalih menginginkan perubahan kebijakan suatu pemerintahan agar

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 189.

<sup>2</sup>Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba’ah Dar al- Ta’lif, 1993), h.10.



sesuai dengan harapan kepentingan bersama dan berguna bagi semua golongan.<sup>3</sup>

4. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang sains Hadits, Aqidah, dan Fiqih.<sup>4</sup>
5. Yusuf Al-Qaradawi **adalah** ulama yang sangat masyhur di era saat ini karena kedalaman ilmu dan da'wahnya. Ia menjadi rujukan banyak kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadits.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “*Analisis Siyasa Syar’iyyah tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)*” adalah untuk menganalisis pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi terkait dengan adanya praktik pelaksanaan aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat hubungannya dengan boleh atau tidaknya berdemonstrasi dalam hukum Islam.

## B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Obyektif

---

<sup>3</sup>Budiman Tanuredjo, Pasung Kebebasan: *Menelisik Kelahiran Undang-undang Unjuk Rasa* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1991), h. 250.

<sup>4</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdul\\_Aziz\\_bin\\_Abdullah\\_bin\\_Baz](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz) (diakses pada tanggal 06 desember 2019 pukul 19:02 WIB)

<sup>5</sup><https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi> (diakses pada tanggal 23 november 2019 ,12:45)

Di dalam suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi, demonstrasi perlu dibutuhkan untuk memberikan gagasan suatu ide dalam pembangunan suatu negara yang majemuk, terlebih lagi negara yang menggunakan kedaulatan rakyat. Namun terkadang demonstrasi terdapat mudhorotnya. Hal tersebut membuat beberapa ulama ikut menyikapi urusan penting ini diantaranya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi. Dalam hal ini penulis ingin mengungkapkan fatwa kedua tokoh tersebut mengenai analisis *siyasah syar'iyah* tentang aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat.

## 2. Alasan Subyektif

- a) Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini.
- b) Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dan disiplin ilmu di Fakultas Syariah jurusan Siyasah.

## C. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah [bentuk pemerintahan](#) dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan [hukum](#). Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik [kebebasan politik](#) secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi

mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup> Asal mula terbentuknya suatu negara demokrasi dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju.

Negara yang berasaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi demokrasi sebagai inti kehidupan bermasyarakat, rakyat wajib taat terhadap pemerintahan. Demonstrasi sebagai ekspresi kebebasan bersuara dan berpendapat sangat diperlukan di negara demokrasi seperti Indonesia. Pemberian izin unjuk rasa bukanlah cermin dari pemerintah yang lemah atau presiden yang lemah tetapi merupakan pemenuhan hak dari rakyat untuk melakukan hal tersebut karena memang dalam demokrasi memberi ruang untuk mengeluarkan pendapat atau pun melakukan aksi protes jika kebijakan yang diambil pemerintah tak sesuai keinginan publik.<sup>7</sup>

Demonstrasi menandakan bahwa masyarakat masih hidup untuk menentukan nasibnya di tengah kegalauan politik nasional yang kian memanas. Masyarakat masih bersuara lantang di tengah hiruk-pikuk politik para penguasa negeri ini. Demo yang terjadi akhir-akhir ini memang kerap berakhir dengan bentrok. Kontak fisik antara pendemo dengan aparat keamanan seakan menjadi langganan setiap kali demo terjadi. Anehnya, tak cuma di satu daerah atau di satu tempat, demo berakhir konflik tersebut hampir terjadi di berbagai daerah. Dalam aksinya, banyak hal yang menjadi polemik dalam demonstrasi itu sendiri. Kerusuhan, anarkis, arogan, perusakan transportasi umum dan hal-hal

---

<sup>6</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.134.

<sup>7</sup> Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia* (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008), h. 44.



negatif sering dikaitkan dengan aksi demonstrasi, namun disisi lain ada beberapa problematika rakyat yang bisa terselesaikan lebih cepat dengan cara berunjuk rasa.

Krisis idealitas aksi demonstrasi ini merupakan sebuah kecemasan tersendiri bagi proses demokrasi di negeri ini. Karena bagaimanapun, demo disertai tindakan anarkis memang tak boleh dibiarkan. Selain menodai perjuangan para pendemo, anarkisme serta perusakan fasilitas baik milik umum maupun pribadi, tentu mengakibatkan kerugian yang tak sedikit.

Para ulama tidak ketinggalan dalam menyikapi urusan penting ini, terjadi pro-kontra antar ulama terkait hukum boleh atau tidaknya demonstrasi, mengingat bahwa demonstrasi digunakan masyarakat sebagai sarana dakwah amar makruf nahi munkar terhadap masyarakat luas atau terhadap penguasa.

Demonstrasi adalah fenomena modern yang umumnya terjadi hanya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, oleh karena itu demonstrasi tidak diizinkan dan tidak terjadi pada negara-negara otoriter yang berada dibawah penguasa diktator, kerajaan, dan komunisme seperti Arab Saudi, China, Korea Utara, Mesir sebelum revolusi, dan Indonesia pada era pra-reformasi.

Dalam sejarah panjang Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, dan unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. Unjuk rasa terjadi hampir setiap hari di berbagai bagian di Indonesia, khususnya Jakarta, tak lepas dari rangkaian demonstrasi, yang dilakukan oleh mahasiswa atau golongan muda. Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945, demonstrasi 1965

yang menggulingkan pemerintahan orde lama, peristiwa Malari pada Januari 1974 yang dipicu oleh ketidakpuasan mahasiswa/masyarakat terhadap kekuasaan orde baru yang membuka masuknya modal asing yang mendikte bangsa Indonesia, dan yang paling masih diingat oleh kita adalah demonstrasi mahasiswa 1998 yang menggulingkan pemerintahan orde baru, sebagai tonggak awal lahirnya reformasi.

Akhir-akhir ini, demonstrasi pun kembali dilakukan oleh mayoritas mahasiswa di negeri ini dan terjadi di berbagai daerah. Suara mereka seirama. Menunjukkan ketidakpuasan atas kinerja DPR dalam menyusun dan mengesahkan Undang-Undang, khususnya Revisi Undang-Undang KPK yang dinilai mematikan proses pemberantasan korupsi di negeri kita.

Jika kita melihat pada syariat Islam, akan kita temukan bahwa demonstrasi dibahasa arabkan dengan kata "*Muzhaharat*". Secara umum, dalil yang memperbolehkan atau melarangnya tidak kita temukan secara pasti. Meski demikian, ulama Arab Saudi yang disuarakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan seluruh ulama yang berada jajaran Hai'ah Kibaril Ulama' atau dewan fatwa tertinggi yang paling keras dalam pelarangan demonstrasi bahkan mencela perbuatan ini, menyatakan bahwa demonstrasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemerintahan yang sah sehingga merupakan jenis bughat (memberontak) dan karenanya dihukumi haram serta pelakunya bisa dijatuhi hukuman berat. Jika ditelusuri, alasan penolakan amar makruf nahi munkar dengan cara unjuk karena demonstrasi merupakan perkara yang baru (bid'ah). Bila demonstrasi dikategorikan sebagai sarana da'wah, maka harus jelas hujjahnya, karena tidak terjadi pada masa Nabi SAW, juga

pada masa khulafa' rasyidun. Dan tidak diragukan lagi bahwa aksi demo adalah sebagai pemicu dari kerusuhan yang terjadi selama ini dan berakibat pada kerusakan yang akan meluas.<sup>8</sup> Pendapat semacam ini di Indonesia diikuti oleh mereka yang menamakan golongan mereka dengan Wahabi atau Salafi. Mereka sepakat menolak berdemo karena menganggapnya haram.

Pendapat semacam itu berbeda dengan pendapat Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang menganggap demonstrasi sebagai tindakan yang dihalalkan secara syariat. Ia berpendapat: "Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi (aksi damai) adalah sesuatu yang disyariatkan, karena termasuk seruan dan ajakan kepada perubahan (yang lebih baik) serta sebagai sarana untuk saling mengingatkan tentang haq, juga sebagai kegiatan amar makruf nahi munkar." Beliau menjelaskan tentang syarat dibolehkannya melakukan demonstrasi bisa menjadi suatu hal yang wajib dilakukan, Apabila pemerintah sudah meremehkan, mengekang, serta merampas hak-hak rakyat terutama yang menyangkut dhoruriyatul-khomsah dan menggugat syariat Allah, maka hukumnya menjadi wajib.<sup>9</sup>

Di Indonesia, secara konstitusional demonstrasi merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah, perlunya kepastian dan batasan hukum dalam tata cara pelaksanaan demonstrasi terkait menanggapi adanya suatu kebijakan. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 di dalamnya terdapat tata cara pelaksanaan demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan

---

<sup>8</sup>Dr. Hudzaifah Abud Mahdi As-SamiraiMudzaharah Sya'biyah,. *Tahdzir Asy-Syabab min Fitnah al-Khuruj wa al-Mudzaharat wal-Irhab* Muhammad bin Nashir al-Uroini, h.34

<sup>9</sup><http://www.qaradawi.net/> (diakses pada tanggal 23 november 2019,12.00)



pendapat di muka umum.<sup>10</sup> Namun di sisilain, orang yang melakukan demonstrasi juga harus mentaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Lain halnya dengan hukum Islam yang dimana dalam pelaksanaannya harus melihat terlebih dahulu dalam aspek positif dan negatifnya (antara manfaat dan mudhorot).

Maka dalam hal ini perlu kepastian dan batasan hukum terkait pelaksanaan demonstrasi baik di Indonesia maupun menurut hukum Islam dan pendapat para ulama terhadap demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Adanya perbedaan pendapat terhadap pelaksanaan demonstrasi di dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum tersebut, membuat membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Analisis Siyasaah Syar'iyah tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)*."

#### **D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

---

<sup>10</sup>Sekjen MPR RI, *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), h.154.

1. Fokus penelitian adalah Analisis *Siyasah Syar'iyah* tentang Aksi Demonstrasi terhadap Pemerintah yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi)
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup demonstrasi di pemerintahan yang berdaulat.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi dalam menetapkan fatwanya?
3. Bagaimana analisis *siyasah syar'iyah* pada fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui argumentasi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi dalam menentukan hukum aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat;

2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi dalam melakukan *ijtihad* tentang hukum aksi demonstrasi terhadap pemerintahan yang berdaulat;
3. Untuk mengetahui analisis *siyasah syar'iyah* pada fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang aksi demonstrasi terhadap pemerintahan yang berdaulat.

### **G. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan dan pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.
- 2) Dalam akademisi, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap khazanah keilmuan yang memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri agar dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi terkait hukum dan cara berdemostrasi yang baik dalam kajian *siyasah syar'iyah*.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- 2) Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara lebih kritis.



- 3) Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensial, sebab dengan adanya metode dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian penulis mengemukakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan *kualitatif* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terlebih dahulu”.<sup>11</sup>

#### b) Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan masalah yang diteliti disini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *Normative*, dimana fokus penelitian menitik beratkan pada kajian konseptual beberapa pemikiran tokoh dan bagaimana pemikiran tersebut terealisasi.<sup>12</sup>

### 2. Data dan Sumber data

---

<sup>11</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

<sup>12</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: TARSITO, 1990), h. 139.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data mayor dari beberapa data yang ada. Dalam hal ini sumber data primer didapat dari beberapa Karya tulis yang dihasilkan oleh masing-masing tokoh yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini, seperti salah satu karya Abdul Aziz bin Baaz di antaranya *Fatwa Nûr ‘Alâ Al-Darb* dan *Fatwa bab Ar-rabittah* sedangkan Yusuf Al-Qaradawi *Fatwa-fatwa Kontemporer dan Ijtihad dalam Syari’at Islam*. Sumber data skunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer, yaitu seperti buku karya Aziz bin Muhammad as-Sadha dengan judul *biografi Abdul Aziz bin Baz*, Isbom Talimah *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani *Fathul Qadir*, Darul Ma’rifah cet-3. *Mudzaharah Sya’biyah*, Dr. Hudzaifah Abud Mahdi As-Samirai *Tahdzir Asy Syabab min Fitnah al-Khuruja wa al-Mudzaharat wal-Irhab Muhammad bin Nashir al-Uroini*. pendapat para Ilmuan yang mendukung tema pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan, namun terdapat kesamaan tema yang dikembangkan.
- b. Sumber data tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Arab, ensiklopedia Islam, bibliografi, dan indeks.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena fokus penelitian utama disini bersifat kepustakaan (*library research*), maka menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi, dengan cara menelusuri buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut didapat atau diambil dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode komparatif dan *content analisis* (analisis isi). Metode komparatif digunakan untuk mengkaji eksistensi pemikiran dari masing-masing tokoh yang menjadi fokus kajian didalam penelitian ini guna mengetahui orisinalitas atas pemikiran masing- masing tokoh.<sup>13</sup> Sedangkan *content analisis* merupakan Metodologi dengan menggunakan perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen.<sup>14</sup>

Secara teknis penulis menganalisa pemikiran tiga tokoh terkemuka yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan kompetensi keilmuan yang memadai dan menjadi bidangnya tentang konsep penggalan hukumnya (*istinbât al- hukm*) yang merupakan pesan berbentuk sebuah rumusan teori dengan bantuan beberapa perangkat yang membantu memberikan pemahaman terkait pembahasan hukum waris beda agama. Kedua tokoh dimaksud yaitu, *Pertama*, Abdul Aziz bin

---

<sup>13</sup>Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.18.

<sup>14</sup>Mengutip Arifah Millati Agustina, *Konsep Ri'ayah Al-Mashlahah Najmuddin Al-Thufi Relevansi Dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010), h. 20.



Baaz yang terkenal dengan corak pemikiran fundamentalnya dalam hal menginterpretasi hukum dari sumber asalnya (*nash*). *Kedua*, Al-Qaradawi yang terkenal dengan corak pemikiran moderatnya, di mana secara garis besar ia menolak corak pemikiran model pertama.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Demonstrasi

#### 1. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok atau beberapa orang yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu kebijakan atas suatu kantor, organisasi, institusi, hingga pemerintah. Biasanya bentuk dari demonstrasi berupa menyetujui suatu kinerja hingga kritikan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang dimana menyulitkan dan merugikan beberapa pihak seperti halnya karyawan, ormas, bahkan hingga seluruh elemen masyarakat yang terdapat dalam suatu negara. Keterbukaan dan kritik, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Kendati dalam warna atau perwujudan yang berbeda, keduanya adalah ciri makhluk rasional, sehingga sering dipergunakan sebagai barometer ‘kemanusiaan manusia’.<sup>15</sup>

Istilah demonstrasi ini didefinisikan oleh beberapa pendapat para ahli yakni di antaranya; Tayar Yusuf yang menyatakan bahwa istilah demonstrasi berawal dari kata *demonstration* yang memiliki arti memperagakan atau menampilkan proses keadaan sesuatu. Sedangkan menurut Pius A. Pratanto, demonstrasi diartikan sebagai tindakan bersama-sama dengan tujuan mengupayakan proses pertunjukan mengenai cara penggunaan suatu hal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Novel Ali, *Peradaban Komunikašin Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h.194.

<sup>16</sup>Oleh H Haryanto, *Metode Demonstrasi* (Skripsi yang dibuat tentang *Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi...*, yang diselenggarakan oleh

Unjuk rasa atau demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih dengan tujuan mengeluarkan pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum.<sup>17</sup>

Pengertian unjuk rasa, menurut hukum Islam belum dijelaskan secara pasti baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun dalam realita yang terjadi, praktik demonstrasi hampir sama tujuan nya dengan salah satu ayat berikut;

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۝ ١١

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." [QS. Ar-Ra'd (13) : 11].<sup>18</sup>

Bila kita artikan ke dalam bahasa Arab, demonstrasi yakni biasa dikenal dengan istilah *masirah* atau *muzaharah*, yakni suatu media dan sarana prasarana untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan yang menurutnya benar dan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk bersyi'ar dalam bentuk pengerahan masa. Demonstrasi bisa diartikan sebagai sebuah alat atau sarana untuk mencapai maksud yang diinginkan sebagaimana perumpamaan pisau,

---

IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011), h.1. (On-line), tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/2426/> (14 Desember 2019, 21:24), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>17</sup>Budiman Tanuredjo, Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang unjukrasa (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1991), h. 250.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J ART), 2004), h. 250.

dapat dipergunakan untuk berbuat kebaikan, akan tetapi dapat pula dipergunakan untuk berbuat maksiat.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa istilah demonstrasi memiliki dua makna yakni: (1) menunjukkan kemampuan atau keahlian dalam menerapkan cara penggunaan suatu hal; ataupun (2) mendukung atau menentang suatu usulan dalam suatu kebijakan ditempat umum, baik dalam sebuah perusahaan, institusi, hingga sebuah pemerintahan suatu negara atau dikenal dengan istilah *muzaharah* atau *masirah*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarikannya dalam bentuk pengerahan massa.

## 2. Sejarah Demonstrasi di Dunia

Demonstrasi lahir dari sebuah kata demokrasi yang terdiri dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratos/cratein* yang memiliki arti “pemerintahan” atau dikenal dengan istilah pemerintahan rakyat yang dimana pernyataan tersebut berasal dari wilayah pemerintahan Yunani kuno yang di umumkan di kota Athena kuno pada abad ke-5 Masehi.<sup>19</sup> Maka dalam hal tersebut, perbedaan pendapat dalam sebuah demokrasi sangat sering terjadi. Bahkan tak jarang juga menimbulkan perselisihan yang menimbulkan kekacauan baik didalam ruang rapat umum maupun diluar lingkup ruang rapat umum.

Allah SWT selalu mengingatkan manusia agar selalu menjaga *ukhuwah Islamiyyah* maupun *ukhuwah Insaniyyah* untuk menjaga adanya gesekan-

---

<sup>19</sup>Lihat, *Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Lampung: IAIN Raden Intan, 1978), h. 25.



gesekan terhadap hak dan kewajiban baik bagi penguasa maupun rakyatnya. Pengertian demonstrasi secara bahasa berasal dari kata *Demonstrate* yang berarti mempertunjukkan atau mempertontonkan demonstrasi.<sup>20</sup> Dapat disimpulkan bahwa demonstrasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum atau dikenal dengan istilah unjukrasa. Allah swt berfirman :

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ  
يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ  
٦٥

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau dia yang mencampurkanmu dalam kedalam golongan-golongan(yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain.” Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahaminya(nya). [QS. Al-An'am (7-8) : 65].<sup>21</sup>

Didalam Ayat tersebut kita dapat melihat disaat golongan umat Muslim disatukan, maka disitu pula Allah SWT memberikan kesempatan mufakat dalam musyawarah. Apabila mufakat tidak ditemukan maka akan menimbulkan pertentangan didalam berpendapat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda;

<sup>18</sup>Djalinus Syah, Azimar Enong dan Mulfaydes, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 93.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), h. 280.

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ  
عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: An-Nu 'man ibn Basyir R .A. berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perumpamaan kaum Mu'min dalam hal saling sayang-menyayangi, saling kasih-mengasihi dan saling iba-mengibai itu adalah bagaikan sesosok tubuh. Jikalau salah satu anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, maka tertarik pula seluruh tubuh karena ikut merasakan sakitnya dengan berjaga tidak tidur serta merasa panas." [HR.Muslim].<sup>22</sup>

Berdasarkan hukum tersebut, menjelaskan bahwasanya seorang muslim yang mukmin diperintah oleh Rasul untuk selalu meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan selalu bersatu dalam berbagai hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan. Dan Allah SWT memaklumi adanya sebuah perbedaan berpendapat baik yang mencapai kesepakatan maupun justru yang saling bertentangan di dalam maupun di luar ruangan, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan dampak, baik bagi yang bertentangan maupun orang lain diluar pertentangan tersebut.

#### 1. Revolusi Perancis (1791)

Disebutkan dalam sejarah demokrasi, sebuah pergolakan terkait adanya usaha revolusi Perancis terhadap suatu kebebasan, persamaan dan persaudaraan, negara Perancis pun secara resmi menerapkan sistem demokrasi didalam suatu undang-undang mereka dengan dasar penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1791. Ketika Perancis menjajah dunia, yang dimana negara-negara jajahannya tersebut diantaranya adalah negara seperti halnya Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan negara muslim

<sup>22</sup>Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam, h. 96.

lainnya. Secara waktu yang bersamaan muncullah sistem demokrasi tersebut diwilayah negara jajahannya.<sup>23</sup>

## 2. Amerika (1877-1893)

Peristiwa pertama kali terjadi pada saat musim semi tahun 1887, sebuah jurnal pertanian hasil dari sebuah penelitian di north Carolina menggambarkan nasib para petani di Amerika Serikat waktu itu. Para petani yang jauh dari kemakmuran, Sampai abad ke-19 kehidupan pekerja industri sangatlah sulit. Krisis ekonomi secara berkala melanda seluruh negeri sehingga mengikis upah buruh industri dan membuat pengangguran semakin tinggi. Upaya besar pertama untuk membentuk kelompok pekerja yang berbasis nasional ditandai dengan munculnya *The Noble Order of the Knights of Labor* ( Orde mulia ksatria pekerja) ditahun 1869. Namun pada akhirnya *The Knights of Labor* mengalami kemunduran, sehingga kaum buruh melakukan aksi mogok kerja. Pada tahun 1877 usaha-usaha yang dilakukan untuk membubarkan pemogokan ini menyebabkan terjadinya kerusuhan dan perusakan dalam skala luas di beberapa kota seperti, Baltimore, Maryland; Chicago, New York dan berbagai kota di Amerika Serikat lainnya. Disusul insiden *Haymarket Square* terjadi 9 tahun kemudian. Ketika itu seorang melemparkan bom ke sebuah pertemuan yang sedang mendiskusikan pemogokan yang sedang berlangsung di Chicago, insiden ini menewaskan 9 orang dan melukai 60 orang. Selanjutnya terjadi

---

<sup>23</sup>Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), h.29.

kerusuhan pada tahun 1893 di pengecoran baja *Carnegie* di Homestead, Pennsylvania yang menyebabkan 10 orang meninggal.<sup>24</sup>

### 3. Mesir (1971-2011)

Mesir pada tahun 1971 presiden Husni Mubarak menguasai secara luas atas negara tersebut. Rezim Husni Mubarak terkenal dengan korupsinya, bahkan masyarakatnya menganggap dia sebagai seorang diktator. Salah satu dari peristiwa tersebut yakni adanya upaya korupsi secara masal yang terjadi di wilayah kementerian dalam negeri. Peristiwa tersebut terus terjadi dikarenakan bertambahnya hak kekuasaan terhadap suatu sistem institusional yang diadakan guna mempertahankan posisinya sebagai seorang presiden dalam kurun waktu yang cukup lama. Upaya dari korupsi tersebut juga menimbulkan adanya tokoh politikus dan para aktivis muda yang dipenjara tanpa melalui proses persidangan. Selain itu rezim Husni Mubarak juga mempunyai penjara rahasia yang cukup banyak dan memberikan kebebasan kepada pejabat yang mendukungnya serta digunakan untuk mengganggu privasi rakyat. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Husni Mubarak tersebut, menimbulkan spekulasi bahwasanya hal tersebut telah menciderai adanya sebuah teori kedaulatan rakyat, yang dimana menurut Rousseau rakyat diartikan sebagai kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang memiliki kehendak melalui sebuah perjanjian masyarakat. Hingga tahun 1999, Husni Mubarak sudah terpilih menjadi presiden selama 5 kali. Hal ini tentu memunculkan tekanan, baik domestik maupun internasional, agar

---

<sup>24</sup>Muhammad Anwar, *Demonstrasi Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)* (skripsi yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 20 September 2019), h. 18.(Online).



mesir segera melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang demokratis.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, pada 26 Februari 2005, Husni Mubarak memerintahkan parlemen untuk mengamandemen undang-undang dasar negara tersebut, sehingga memungkinkan adanya calon lain dalam pemilihan presiden. Pada tanggal 8 September 2005, salah seorang calon kalah, Ayman Nour. Dia menolak hasil pemilu tersebut dan menuntut dilakukannya pemilu ulang. Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil karena Ayman Nour justru dituduh melakukan pemalsuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Menyusul jatuhnya rezim Ben Ali di Tunisia, Mesir pun mulai bergejolak. Pada 25 Januari 2011, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut Husni Mubarak mundur dari jabatannya. Para demonstran berkumpul di Tahrir Square. Upaya untuk mengatasinya pun dilakukan oleh Husni mubarak yakni dengan mengerahkan kekuatan militer untuk membubarkan para demonstran tersebut. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan, kerusuhan pun terjadi dimana-mana. Tindakan refresif yang dilakukan oleh kekuatan militer Husni Mubarak menyebabkan banyak korban berjatuhan, dari pihak demonstran sekitar 850 orang demonstran terbunuh dalam peristiwa tersebut. Meskipun demikian, Husni Mubarak terus bersikeras untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun dikarenakan keadaan yang terus menekan, Akhirnya Husni Mubarak pun menyatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai seorang presiden dipemilu yang akan datang. Namun dia juga mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya ingin menyelesaikan masa

---

<sup>25</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24870> (14 desember 2019, 10:01), dapat dipertanggung jawakan secara ilmiah.

jabatan dan menjanjikan adanya reformasi dalam konstitusional. Pernyataan tersebut tidak mendapat respon positif oleh masyarakat sehingga demonstran yang telah berkumpul didepan istana negarapun langsung memulai tindakan anarkis. pada 11 Februari 2011 wakil presiden Omar Suleiman mengumumkan pengunduran diri Husni Mubarak, selain itu juga menyampaikan secara tegas bahwa pemerintahan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak militer. Tepat pada tanggal 28 Februari 2011, jaksa melarang Husni Mubarak dan keluarganya untuk pergi meninggalkan wilayah Mesir dikarenakan statusnya sebagai tahanan rumah yang dimana akan dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan keluarganya yang dimulai pada tanggal 13 April 2011 lalu.<sup>26</sup>

#### 4. Indonesia (1990-1998)

Demonstrasi sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Bung Karno, yang dimana juga pernah terjadi aksi demonstrasi yang ditunggangi agenda "kudeta" terhadap kekuasaan Bung Karno, yakni pada tanggal 17 Oktober 1952. Namun disayangkan sejarah resmi Indonesia jarang menceritakan peristiwa tersebut. Hingga kekuasaan Presiden pada masa Soeharto yang dimana dianggap sangat absolut. Hal ini terjadi akibat melemahnya UUD 1945 dan sistem pemilihan Presiden yang melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal ini terjadi saat masa paruh kedua pada pemerintahannya (1959-1966). Adanya kelemahan tersebut, maka dimanfaatkan oleh Soeharto hingga bisa dipilih berkali-kali hingga selama lebih 30 tahun. Pada akhir kepemimpinannya, yakni pada tahun 1990-an Soeharto dikenal dengan

---

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 19

presiden yang diktator yang mempunyai kekuasaan yang tidak memiliki batas. Banyak yang meyakini bahwa dia bukan lagi seorang Presiden, melainkan seorang raja. Masyarakat di seluruh Indonesia tidak lagi mempercayai kepemimpinannya terutama seluruh elemen mahasiswa. Sebagian besar menganggap bahwa pemerintahannya saat itu, melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peristiwa besar tersebut mengakibatkan banyak desakan dari segala sudut untuk memaksa Soeharto segera turun dari kekuasaan yang dia pegang selama lebih dari 30 tahun, yang bermula dari krisis moneter yang terjadi di Thailand pada awal Juli 1997.<sup>27</sup>

Mengingat akan suatu tuntutan reformasi yang terus meningkat dan sejalan dengan adanya krisis ekonomi yang terus memburuk juga terbukti sangat jelas akan adanya ketidakmampuan rezim untuk mereformasikan diri, sehingga membuat unjukrasa mahasiswa semakin marak terjadi. Demonstrasi semula dilaksanakan di wilayah kampus. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang melakukan aksi di wilayah DPR untuk menyuarakan keluhan kesah dari masyarakat. Memasuki bulan Januari 1998, jumlah mahasiswa yang turut berpartisipasi untuk mengikuti unjukrasa tersebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah ratusan orang, yang dimana semakin kuatnya dikarenakan diikuti oleh alumni dan dosen yang prihatin akan peristiwa yang melanda negara tersebut. ABRI pun membiarkan aksi yang dilakukan di kampus, mengingat

---

<sup>27</sup>Dede Rosyada, et. al., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003), h. 214.

maraknya aksi unjuk rasa. Namun pada bulan Mei, aksi mahasiswa mulai dilakukan di jalan-jalan di berbagai kota besar. Namun peristiwa tersebut mengakibatkan kerusuhan besar yang terjadi di Medan. Pada saat demonstran menggelar aksi pada tanggal 12 Mei di Universitas Trisakti Jakarta, penembak jitu ABRI pun dikerahkan untuk menembak empat orang mahasiswa demonstran. Peristiwa tersebut membuat beberapa tokoh penting didalam militer yakni diantaranya jenderal Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyadari bahwasanya pemerintahan Soeharto tersebut tidak dapat untuk dipertahankan kembali. Diwaktu hari berikutnya tepatnya pada tanggal 13 Mei, setelah melakukan penguburan keempat mahasiswa tersebut, Ribuan Mahasiswa Trisakti menggelar aksi berkabung dikampusnya. Masa pun mulai berkumpul di lingkungan kampus Trisakti. Pada saat mereka hendak bergabung, pencegahan dilakukan oleh aparat keamanan sehingga mengakibatkan masa mengamuk dan melakukan aksi pelemparan hingga perusakan. Sejak peristiwa tersebut, demonstran menggelar aksi terus menerus baik di kota maupun di daerah-daerah. Yang dimana setiap aksi tersebut dilakukan dengan diiringi perusakan-perusakan fasilitas negara maupun daerah, guna meminta Soeharto segera bertanggung jawab dan segera mundur dari wilayah pemerintahannya. Puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998, presiden mengumumkan pengunduran dirinya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia karena disebabkan banyaknya desakan baik dari DPR, MPR, dan para demonstrasi yang sudah tak terbendung lagi.<sup>28</sup> Dalam peristiwa tersebut, mahasiswa dan rakyat dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 22.



menyampaikan pendapat di muka umum tidak lepas dari peran mahasiswa aktivis, yang dimana sejalan dengan sifatnya yang responsif yang tidak mau menerima keadaan sosial demikian saja, mereka selalu bersikap kritis. Sikap kritis yang meliputi segala hal, bahkan hingga tanpa kreativitas untuk memecahkan masalah, yang selanjutnya menimbulkan sikap anti yang lebih besar daripada kemampuan positif untuk memberikan alternatif, atau kemampuan untuk bersikap pro terhadap sesuatu dalam hal gerakan protes mahasiswa.<sup>29</sup>

#### 5. Libya (1990-2011)

Ekspresi musim semi bagi demokratisasi di dunia Arab atau dikenal dengan sebutan *Arab Spring*. Gejolak protes diawali dari negara Tunisia yang kemudian negara-negara lain seperti Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan saat ini yang masih berkejolak yakni Suriah pun mengikutinya.<sup>30</sup> Peristiwa yang terjadi di Libya pertama kali, yakni ketika Libya dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Muammar Gaddafi. Ketika negara tersebut dipimpin olehnya, seketika pemerintahan negara tersebut berubah menjadi sistem otoriter dan diktator. Salah satu contohnya yakni ialah mengusir orang Italia yang bertempat tinggal di Libya serta melakukan "pembersihan" terhadap etnis. Secara ekonomi sebenarnya Libya termasuk negara dengan sumber daya alam yang melimpah yakni salah satunya adalah penghasil minyak bumi, namun pada kenyataannya negara ini tidak tergolong negara maju secara ekonomi. Hal tersebut tidak bisa lepas dari suatu dugaan terkait

<sup>29</sup>Sarlito Wirawan. S, *Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam gerakan protes mahasiswa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 204.

<sup>30</sup>Danu Eko Agustinova, *Latar belakang dan masa depan libya pasca arab spring*, (Yogyakarta: Jurnal, 2013), Vol. 10, No. 2, h. 121 (On-line), tersedia di: <https://journal.uny.ac.id> (15 Desember 2019, 16:03), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi dan kerabatnya. Perusahaan-perusahaan besar hanya dikuasai oleh kerabat-kerabat dekat dan keluarganya.<sup>31</sup> Rezim Muammar Gaddafi pun mulai nampak adanya oposisi yang ingin menggulingkannya yakni tepatnya pada tahun 1990. Oposisi tersebut bernama *Libyan Islamic Fighting Group* yang dimana kelompok tersebut nyaris saja berhasil menggulingkan Muammar Gaddafi bahkan hampir membunuhnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1996 yang dimana pemerintahannya terus bergejolak terkait adanya kelompok oposisi tersebut. Semenjak peristiwa tersebut, Muammar Gaddafi pun melakukan tindakan represif yakni mengutus tentaranya untuk segera menindak lanjuti pihak yang mengatas namakan kelompok oposisi tersebut. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi tersebut, menimbulkan adanya suatu peristiwa yang sangat memilukan. Peristiwa tersebut yakni perang sipil yang dimana peristiwa tersebut berlangsung antara bulan Februari hingga Oktober 2011 yang menewaskan ribuan orang. Tidak dipastikan jumlah korban tewas, namun diperkirakan jumlahnya berkisar 10.000 hingga 40.000 jiwa yang dimana mayoritasnya warga sipil. Dan peristiwa tersebut membuat ratusan ribu warga sipil mengungsi di negara-negara lain disekitaran Libya, seperti halnya Mesir dan Tunisia mengingat negaranya yang tak lagi kondusif dan banyaknya tempat tinggal yang porak poranda akibat peristiwa tersebut.<sup>32</sup> Hingga pada akhirnya, hampir seluruh sebagian besar wilayah Tripoli dikuasai oleh pemberontak, peristiwa tersebut terjadi yakni pada tanggal 25 Agustus 2011.

---

<sup>31</sup>*Ibid.* h. 124.

<sup>32</sup>*Ibid.* h. 125.

Selanjutnya Pada tanggal 20 Oktober 2011, Muammar Gaddafi berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya. Hingga akhirnya Muammar Gaddafi tumbang oleh para demonstran dan pihak yang mengatas namakan oposisi tersebut, yang menuntut untuk mundur dari jabatannya.<sup>33</sup>

Peristiwa tersebut terbukti bahwa unjukrasa belum dikenal pada masa pemerintahan nabi maupun para sahabat, melainkan bentuk dari permasalahan orang nonmuslim yang mengingkari Rabb semesta alam. meskipun terdapat kemiripan di dalam wujud berpendapat di tempat umum.<sup>34</sup>

### 3. Sejarah Praktik Demonstrasi dalam Islam

#### a. Masa Rasulullah SAW

Dalam sejarah Islam demonstrasi tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW. Namun bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat (*ijtihad*), Rasulullah pernah melakukannya, yakni ketika terjadi permasalahan di tengah umat Islam, dan Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah SWT untuk meminta petunjuk untuk menjawab persoalan tersebut namun wahyu Allah SWT tak kunjung datang sedangkan persoalan tersebut sangatlah genting. Kemudian Rasulullah SAW berijtihad yang berdasarkan Al-Quran.<sup>35</sup> Kemudian pada peristiwa lain, terjadi pada tahun ke-6 H saat Rasulullah SAW memerintah kurang lebih seribu kaum muslim untuk berangkat menuju Makkah dengan maksud untuk melaksanakan ibadah umrah yang dimana tinggallah sementara

<sup>33</sup>*Ibid.* h. 25.

<sup>34</sup>*Ibid.* h. 30.

<sup>35</sup>Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'* (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 41.

disebuah perkemahan yakni di daerah Hudaibiyah dan terletak tak jauh dari kota Makkah. Masyarakat pun memprotes dan mereka tidak mengizinkan rombongan untuk memasuki kota Makkah, sehingga protes tersebut menghasilkan sebuah titik terang, yakni hadirnya sebuah perjanjian diplomatik yang dinantikan Rasulullah yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah yang menghasilkan kebijakan yakni pelarangan kaum muslim yang hendak pergi mengunjungi Ka'bah pada tahun tersebut, akan tetapi ditangguhkan ditahun yang akan datang, serta lama kunjungan hanya dibatasi selama tiga hari, umat muslim wajib memulangkan penduduk Makkah yang pergi ke Madinah dan begitu juga sebaliknya, kaum quraisy tidak diperbolehkan melarang penduduk Madinah yang ingin kembali ke Makkah, dan membebaskan rintangan bagi kabilah yang hendak bergabung kedalam persekutuan kaum quraisy atau kaum muslim.<sup>36</sup>

Allah SWT berfirman :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ  
لَفُضِّيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢١

Artinya: "Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahan selain Allah, yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" [QS. Asyuraa' (25) : 21].<sup>37</sup>

Berdasarkan ayat di atas, yakni merupakan perintah Allah SWT agar senantiasa umat Islam bersatu dalam menjaga agama Allah SWT, dan melarang adanya sebuah perselisihan. Unjukrasa merupakan permasalahan kontemporer atau hal yang belum pernah dikenal sebelumnya dizaman

<sup>36</sup>Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 30, mengutip Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h. 16.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI. h. 485.



Rasulullah SAW (*Bid'ah*) maupun dizaman para sahabat, namun bukan berarti setiap masalah tidak memiliki hukum dalam pandangan syariat, dikarenakan agama Islam merupakan agama yang sempurna dalam menjawab persoalan-persoalan yang berupa kaidah ataupun dalil fiqh yang disampaikan oleh ulama ahli fiqh. Demokrasi yang merupakan bentuk dari produk politik *non-muslim* yang berawal dari kalimat *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya pemerintahan merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah demonstrasi dan belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW.

**b. Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq**

Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, belum nampak terjadinya sebuah peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi. Namun upaya untuk menyampaikan aspirasi pendapat dimuka umum sudah mulai nampak, yakni ketika upaya umat Islam dalam melanjutkan estafet kepemimpinan dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, yang dimana diadakanlah sebuah musyawarah dengan antusias demi menguatkan ukhuwah Islamiyah yang sangat tinggi sehingga kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. (14-15H/632-634M), yang disepakati dan dibaiat oleh kedua pihak yakni *Muhajirin* dan *Anshar*. Pemerintahan Abu Bakar R.A. berlangsung selama dua tahun. Beliau memimpin dengan cara menirukan hal yang disampaikan Rasulullah SAW hingga wafat<sup>38</sup>

**c. Masa Khalifah Umar bin Khatab R.A**

---

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 35.

Pada masa Umar bin Khatab R.A. (15-24H/634-644M), Pemerintahan ini berlangsung selama sepuluh tahun. Di awal kepemimpinan beliau belum nampak adanya tanda-tanda perselisihan bahkan hingga menimbulkan aksi berupa unjuk rasa dikarenakan pada kepemimpinan Umar bin Khatab R.A. sangatlah tegas selain itu juga, setiap kebijakannya tidak melupakan kewajiban sebagaimana seorang hamba kepada Tuhan nya, dan beliau juga merupakan Khalifah yang di tunjuk oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. karena kepercayaannya untuk melanjutkan estafet ke Khalifahan. Namun ketegasan sosok yang diberi gelar *Amirul Mu'minin* ini meregang nyawa oleh tawanannya sendiri. Hal tersebut terjadi dikarenakan penetapan peraturan *jizyah* atau pajak yang ditetapkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah (Gubernur Kufah) kepada seluruh tawanannya tersebut terlalu besar sehingga salah seorang budak tersebut mengajukan keberatan atas peraturan tersebut kepada khalifah, namun hal tersebut ditolak oleh sang Khalifah. Sosok dari tawanan tersebut yakni merupakan *Ghulam* yakni merupakan salah satu tawanan yang beranjak dewasa yang diajak menemui Khalifah dikarenakan memiliki keahlian dalam berperang, atau dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah yang melakukan pemberontakan kepada sang Khalifah Umar dengan cara ditikam dengan pedang bermata dua dihari yang berbeda pada waktu subuh. Pada peristiwa tersebut mulai nampak terjadi penyampaian pendapat yang berujung anarkis dalam sejarah Islam yang merupakan peristiwa besar besar yang tercatat oleh sejarah.<sup>39</sup> Singkat cerita, terbunuhnya Khalifah Umar dikarenakan Pajak yang ditetapkan Gubernur

---

<sup>39</sup>Abdurrahman 'Umairah, *The Great Knight Kesatria Pilihan di sekitar Rasulullah*, terjemahan Badruddin, Muhyidin (Jakarta: Embun Litera, 2010), h. 39.

dari Khalifah Umar kepada para tawanan tersebut terlalu banyak dan permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Umar R.A.. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi Abu Lu'lu'ah sehingga Umar ibn Khatab R.A. pun dibunuh.

**d. Masa Khalifah Utsman bin Affan R.A**

Masa pemerintahan Utsman bin Affan R.A. (24-35H/644-655M), kepemimpinannya berlangsung selama 12 tahun. Pada saat separuh menjelang akhir dalam suatu pemerintahannya, mulai nampak adanya pernyataan-pernyataan masyarakat tidak setuju atas kebijakan yang telah diterapkan olehnya, sehingga kalangan umat Islam mulai nampak adanya perasaan ketidakpuasan hingga kecewa terhadapnya. Masyarakat menyatakan pendapat yakni dalam pernyataan kekecewaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan tersebut yang terdiri dari beberapa faktor yakni diantaranya, adanya dugaan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Utsman R.A. yang dimana mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan tanpa melihat aspek keahlian dari jabatan yang dimiliki oleh kedudukan tersebut. sosok yang dianggap paling penting yakni adalah Marwan bin Hikam, karena sesungguhnya dialah yang mengendalikan kekuasaan, dan Utsman hanya berstatus Khalifah. Selanjutnya adanya harta kekayaan negara oleh kerabatnya yang dibagi-bagi dan hal tersebut tidak diketahui oleh Utsman R.A.. Ketidak tegasan Utsman R.A. terhadap kesahlahan bawahannya dalam melaksanakan tugas pun memunculkan kebencian umat Islam terhadapnya.<sup>40</sup> Pada puncak

---

<sup>40</sup>Bunyana Solihin, *Kaidah hukum Islam didalam tertib demonstrasi* (Yogyakarta: Kreasi total media, 2016), cet.1, h. 137

kekecewaan tersebut menimbulkan kekerasan fisik dan berbuah pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang kecewa tersebut hingga tega membunuh sang Khalifah Utsman R.A.. Pada masa ini praktik demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pemberontakan mulai memuncak pasca wafatnya Rasulullah SAW, dan pasca terbunuhnya Umar bin Khatab R.A. Bila kita melihat hal tersebut bukan hal mutlak kesalahan Utsman R.A. dikarenakan beliau di pilih menjadi khalifah pada usia 70 tahun melalui pilihan yang ditunjuk Umar bin Khatab R.A. dari enam kandidat yakni diantaranya adalah Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Saad ibn Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf. sehingga pada usia lanjut tersebut dimanfaatkan oleh keluarganya yang menginginkan jabatan dan kekuasaan.

#### **e. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib R.A**

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib R.A. (35-40H/655-660M), Pemerintahan Ali R.A. berlangsung hanya selama enam tahun. Beliau menggantikan Khalifah Utsman R.A. pasca terbunuh dari beberapa pemberontak. Khalifah Ali R.A. diangkat berdasarkan baiat yang dilakukan oleh masyarakat secara beramai-ramai. Pada masa pemerintahannya selalu terjadi pergolakan sehingga tidak dapat dikatakan stabil. Salah satu kebijakan yang diambil Ali R.A. tersebut yakni, memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman R.A. yang diyakini keteledoran merekalah yang mengakibatkan pemberontakan dalam kekhalifahan. Ali R.A. juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman R.A. kepada masyarakat dengan cara menyerahkan hasil dari pendapatannya kepada negara, serta kemudian kembali menggunakan sistim distribusi pajak yang



sebelumnya pernah diterapkan pada masa kekhalifahan Umar R.A.. Setelah Ali ibn Abi Thalib R.A. merubah kebijakan tersebut, tidak lama kemudian beliau menghadapi pemberontakan yang dilakukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah R.A.. Hal tersebut terjadi setelah penyampaian pendapat dan melakukan aksi bela berupa tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman R.A. kepada Ali R.A. untuk segera diadili, namun Ali R.A. pun menolak untuk menghukum seseorang yang diduga kuat telah membunuh Utsman R.A. tersebut. Khalifah Ali R.A. pun sebenarnya menginginkan sebuah sikap untuk menghindari peperangan, bahkan beliau sempat mengirimkan surat terhadap Zubair dan Thalhah untuk bermusyawarah dan mengakhiri permasalahan dengan cara berdamai. Namun upaya tersebut ditolak sehingga akhirnya pertempuran besar pun terjadi hingga peristiwa tersebut dikenal dengan istilah “Perang *Jamal* (Unta)” dikarenakan sang istri Rasulullah SAW Aisyah binti Abu Bakar R.A. memimpin perang dengan menunggangi unta. Zubair dan Thalhah terbunuh saat ingin mencoba melarikan diri, sedangkan Aisyah binti Abu Bakar R.A. pun ditangkap yang kemudian untuk dipulangkan kembali ke madinah. Kemudian meredamlah aksi pembelaan yang berujung pemberontakan yang terjadi dalam perang Jamal tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, tentang menasihati kesalahan penguasa yang dianjurkan yakni dalam sebuah hadits berikut;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ  
 يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: *Dari Abu Said Al-Khudri R.A. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya (dengan kekuasaannya), jikalau tidak dapat dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya (dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi) dan jikalau tidak dapat juga dengan lisannya, maka dengan hatinya (maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu (yakni dengan hati saja) adalah selemah-lemahnya iman."* [H.R. Muslim].<sup>41</sup>

Namun pada masa ini demonstrasi atau unjuk rasa menyampaikan pendapat dalam pergolakan pemerintahan terus bermunculan yakni diantaranya adanya sebuah perlawanan dari gubernur Damaskus Suriah, hingga Mu'awiyah dengan dukungan penuh oleh sejumlah mantan pejabat tinggi yang merasa dirugikan atas pangkat dan jabatan yang ditimbulkan atas kebijakan Ali R.A. tersebut. Setelah Ali R.A. meredam pemberontakan yang dilakukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah tersebut, kemudian bergeraklah pasukan Ali R.A. dari wilayah Kuffah menuju kewilayah Damaskus dengan jumlah tentara yang cukup banyak yang kemudian saling bertemu di wilayah Shiffin, sehingga perang tersebut dikenal dengan istilah perang *Shiffin*.

Peristiwa tersebut diselesaikan dengan cara *tahkim* (arbitrase) yang tidak membuahkan hasil dalam mengakhiri konflik. Hal tersebut bukan

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, cet.23, terjemahan A. Hassan (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1999), h. 670.

menyelesaikan namun justru malah memunculkan masalah baru yakni adanya golongan ketiga dalam politik, yakni orang yang keluar dari barisan Ali R.A. atau lebih dikenal dengan istilah *al-Khawarij* setelah adanya golongan Mu'awiyah dan Syi'ah (pengikut Ali R.A.). Hal ini mengakibatkan lemahnya kelompok Ali R.A. dan kuatnya kelompok Mu'awiyah sehingga tepat pada tanggal 20 Ramadhan 40H/660M, Ali ibn Abi Thalib R.A. pun dibunuh oleh salah satu yang diduga berasal dari Khawarij.<sup>42</sup>

Dapat disimpulkan pada sejarah praktik demonstrasi dalam Siyash Syar'iyah, bahwasanya demonstrasi menyampaikan pendapat sudah mulai nampak pada setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahkan saat Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. menjadi Khalifah, belum terlihat adanya unjuk rasa. Dimasa pertengahan kekhalfahan Umar ibn Khatab R.A., sudah mulai nampak adanya penyampaian pendapat oleh seorang tawanan Ghulam yang berujung pemberontakan. Saat Utsman ibn Affan R.A. menjadi Khalifah, protes umat Islam atau penyampaian pendapat sudah makin nampak terlihat hingga menimbulkan pemberontakan. Dimasa kekhalfahan Ali ibn Abi Thalib R.A., aksi atau protes juga terjadi pada masa ini. Aksi tersebut dipimpin oleh kelompok yang masih keluarga muslim sendiri. Mereka ialah Thalhah, Zubair, dan Aisyah R.A. Namun yang disayangkan peristiwa tersebut terjadi hingga menimbulkan peperangan. Bahkan pemerintahan setelahnya seperti Hasan (anak Ali ibn Abi Thalib), Mu'awiyah, Abbasiah, Utsmaniyah, hingga masa Islam

---

<sup>42</sup>Oleh Konsultasi Syariah Islam Al-Khoirot (KSIA), *Demonstrasi dalam Islam* (Online), tersedia di: <https://www.alkhoirot.net/2012/05/>, (20 September 2019, 20:00), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

modern sekarang. Praktik penyampaian pendapat kebanyakan dilakukan oleh kaum muslim pasca wafatnya Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman dan tujuan yang tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sang Khalifah pada masa itu.

Di era modern pasca wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabat, terkadang penyampaian pendapat atau unjuk rasa dilakukan bukan hanya semata-mata tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut, namun ada juga yang didasari adanya dukungan dan partisipasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi sangat wajar sekali bila fenomena unjuk rasa atau demonstrasi masih ada hingga sekarang ini, dikarenakan setiap orang memiliki hak, kepentingan dan kebenaran yang harus diperjuangkan.

#### 4. Menyikapi Pemerintah yang Zhalim dalam Pandangan Islam.

Demonstrasi adalah sarana untuk mencapai sebuah maslahat, ia adalah alat bukan tujuan utama. Maka dalam menghukuminya, ia ditetapkan sebagaimana kita menghukumi tujuannya. Karena sarana dihukumi sesuai dengan hukum tujuan. Sedangkan demonstrasi ditujukan untuk menolak kezhaliman para pemimpin di tengah manusia, dan inilah misi yang dipegang para Nabi AS. Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
٢٥

Artinya: “Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca keadilan.”[QS.Al-Hadid (27) : 25].



Keadilan adalah fitrah yang diinginkan setiap manusia. Jika tujuan demonstrasi adalah mencapai keadilan, dan demi tegaknya amar ma'ruf nahi munkar di tengah manusia, maka jelaslah kebolehan demonstrasi. Bahkan jika tujuan tegaknya keadilan membutuhkan aksi demonstrasi, maka menjadi wajib hukumnya mengambil sarana ini.

Demonstrasi sebagaimana telah disebutkan merupakan ibadah yang tidak dihukumi secara rinci dalam nash-nash syar'i. Jika kemunkaran telah nampak jelas, sedangkan banyak hal-hal wajib yang diselewengkan maka dibutuhkan sarana yang dibolehkan untuk menghilangkan kebathilan dan demonstrasi termasuk di dalamnya. Ia menjadi sarana yang dibolehkan karena tujuannya yang sangat penting bagi kemaslahatan umat. Ia dijadikan sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat di tengah penguasa zhalim dan otoriter.

Allah SWT berfirman:

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمَةٍ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ؕ

Artinya: *"Tetapi orang-orang yang membela diri setelah didzalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka."*[QS.Asy-Syura (25) :41].

Ibnu Abbas RA dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan, "Tidak ada dosa bagi mereka ketika mereka mengalahkan orang-orang yang menzalimi mereka."

Ibnu Abbas RA meriwayatkan, seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kezhaliman tetangganya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan barang-barangnya ke depan rumah. Maka lelaki tersebut melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Melihat hal tersebut orang-orang bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Maka lelaki tersebut menjelaskan kezhaliman yang menyimpannya.

Orang-orang yang lewat pun mencela perbuatan sang tetangga yang telah berbuat zhalim. Maka tetangga yang zhalim itu memanggilnya dan berkata, "Pulanglah aku tak akan menyakitimu lagi." (HR. Abu Dawud dan Al Bazzar). Rasulullah SAW menolong lelaki tersebut dari kezhaliman tetangganya, maka para pemimpin yang zhalim lebih berhak dituntut keadilannya oleh rakyatnya.

Beberapa tahun terakhir negara Arab seperti Irak, dipimpin para rezim otoriter. Rezim otoriter melakukan kezhaliman di mana-mana, banyak hak-hak rakyat yang tidak mereka tunaikan. Bahkan kewajiban-kewajiban dan syiar-syiar Islam banyak tersisihkan. Berbagai macam nasehat dan khutbah disampaikan untuk para rezim otoriter, namun tak ada yang mengambil pelajaran. Surat-surat pun telah dikirim, berbagai macam nasehat lewat media sosial telah dilayangkan namun tak juga membuahkan hasil. Sampai akhirnya mereka melakukan aksi demonstrasi damai yang dapat menuntut keadilan bagi rakyat. Hingga runtuhlah beberapa rezim otoriter yang telah memimpin berpuluh-puluh tahun. Dan rakyat pun dapat merasakan keadilan kembali di tengah mereka.

Pernyataan tidak boleh mengkritik pemimpin muslim di tempat terbuka. Karena hal itu akan mengakibatkan keresahan dan menjatuhkan martabat para pemimpin. Tapi disamping itu pula ada pendapat ulama-ulama yang membolehkan yang dikuatkan dengan dalil-dalil tentang bolehnya mengkritik penguasa baik itu muslim ataupun non muslim di tempat terbuka di hadapan penguasa itu sendiri ataupun tidak di hadapannya. Rasulullah SAW-pun tak luput dari hal tersebut:

- 1) Baginda SAW diprotes ramai oleh para sahabat karena melarang puasa wishal (sambung) (HR Bukhari, Muslim, Malik).
- 2) Baginda SAW mendapatkan rumor yang beredar di kalangan Anshar yang tidak puasa dan mengkritik kebijakan Nabi SAW yang membagikan ghanimah perang Hunain kepada suku Quraisy saja yang baru saja masuk Islam (HR.Bukhari Muslim).
- 3) Baginda SAW mendapatkan protes keras dari Umar RA terkait perjanjian Hudaibiyah, Ali juga menolak perintah nabi SAW untuk menghapuskan kata Rasulullah dari perjanjian yang ditulisnya, beberapa sahabat lainnya mogok gerak karena kecewa tidak bisa masuk Makkah hingga akhirnya tersadar setelah Allah SWT menurunkan surat Al-Fath (HR.Bukhari).
- 4) Umar RA ketika berbicara di mimbar nabi untuk menyeru pembatasan mahar wanita menjadi maximum 400 dirham, lalu seorang wanita di antara hadirin memprotesnya karena tidak sesuai dengan hukum yang lebih kuat (Lihat tafsir Ibnu Katsir QS 4:20 dengan sanad jayid)  
Catatan: sekelompok orang sengaja menilai hadits ini dhaif untuk mengingkari peristiwa ini).
- 5) Utsman RA didemo untuk mencopot Marwan dari jabatannya oleh sekelompok orang Mesir di depan rumahnya. Para sahabatpun tidak membubarkan demo ini. Andaikan demo adalah maksiat tentu mereka pasti membubarkannya.
- 6) Ali bahkan lebih dari sekedar didemo, namun hingga taraf diperangi oleh beberapa sahabat termasuk oleh ibunda Aisyah RA yang tidak

setuju dengan kebijakan Ali yang tidak segera menghukum pembunuh Utsman RA.

Jika penguasa adalah sosok yang menyebabkan tersebarnya kerusakan di tengah manusia, tidak berhukum kepada hukum Allah dan RasulNya, tidak menegakkan keadilan dan tidak menjalankan kekuasaan dengan amanah, maka ada sebuah kisah, pada abad 5H, Imam Zamakhsyari menganggap penguasa zalim saat itu sebagai, "pencuri yang menang", meskipun mereka masih menetapkan hukum Allah. Bagaimana jika ia melihat pemimpin masa kini? Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang bermaksiat pada sang Khaliq, sungguh ketaatan hanya kepada yang ma'ruf." (HR. Ahmad).

Nahi munkar kepada penguasa yang banyak melakukan kemungkaran adalah kewajiban bagi Umat atau rakyat. Allah SWT berfirman:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٧٨ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٧٩

Artinya: "Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." [QS.Al-Maidah (6) :78-79].

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Shidiq RA, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia jika mereka menyaksikan kemungkaran, lalu mereka tidak berupaya menghentikannya, maka dikhawatirkan Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka semua." (HR. Abu Dawud).



Siapakah manusia yang dimaksud dalam hadits? Mereka adalah rakyat, para tokoh dan Ulama yang memimpin mereka.

## 5. Demonstrasi dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah

Di tengah dunia Islam dikenal istilah *muzhaharah*, Secara sederhana *muzhaharah* dapat dikatakan adalah wasilah (sarana) dalam penyampaian untuk mendapatkan dukungan, menarik perhatian, dan membentuk opini umum ditengah masyarakat. Muzahharah ditandai dengan sejumlah orang turun kejalan, lapangan atau tempat-tempat khusus yang diperuntukkan untuk hal tersebut, guna menarik perhatian dan simpati publik terhadap pendapat yang disampaikan.<sup>43</sup>

Dimasa Rasulullah SAW, maupun dalam sejarah kaum muslimin dapat kita melihat bahwa secara umum *muzhaharah* ada dua jenis: pertama *muzhaharah fariyah*, sedangkan kedua *muzhaharah jam'iah*. Adapun *muzhaharah fardiyah* (unjuk rasa individu) adalah unjuk rasa yang dicontohkan oleh *Abu Dzarr al-Ghifari*, ketika mengumandangkan kalimat tauhid ditengah orang banyak, dan *muzhaharah* yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kepada seorang laki-laki yang dizalimi tetangganya, *muzhahara* ini inisiatifnya dari individu, ketika ia merasa bahwa kebenaran itu terkungkung sedemikian rupa sehingga ia ingin menyarakan pendapat ditengah masyarakat atau orang banyak. *Muzhaharah* ini biasanya dengan cara spontanitas tanpa perencanaan sebelumnya.

---

<sup>43</sup>Aus Hidayat, *Fiqh Demonstrasi kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna 2002) cet I h. 5.

Apabila keadaan yang memungkinkan unjuk rasa individu boleh dilakukan oleh setiap muslim dengan memperhatikan adab dan ahklak dalam menyampaikan pendapat didepan umum dan menarik dukungan *public*.

Sedangkan *muzahharah jam'iyah* (unjuk rasa bersama), adalah *muzahharah* yang dilakukan dengan perencanaan oleh suatu lembaga Islam tertentu yang berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi kelompok. Seperti *muzhaharah* I yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ketika Umar Bin Khatab dan Hamzah bin Abdul Mutholib baru masuk Islam. Rasul SAW merencanakan rumusans strateginya sedemikian rupa sehingga muzhaharah ini mampu membangun citra Islam dan menggalang opini yang baik dihati masyarakat saat itu. *Muzhaharah* bersifat kerja bersama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara organisatoris bagi kaum muslimin yang tergabung dalam lembaga yang menyelenggarakan demonstrasi tersebut, karena merupakan hasil dari suatu musyawarah untuk melakukan aksi. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

Artinya : “Dan bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka”. [QS. As-syura (25) : 38].

Bila ada yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini, wajib baginya berpartisipasi dalam bentuk lain, misalnya dengan memeberikan dana bagi mereka yang ikut *bermuzhaharah*, menyediakan kendaraan, makanan atau

atribut *muzhaharah*.

Al-Qur`an dan hadist tidak secara langsung menyuruh kita untuk melakukan *muzhaharah* sebagai demonstrasi, sebagaimana kita pahami sekarang ini, yang diperintahkan adalah menyampaikan kebenaran, sehingga menyampaikan atau memperjuangkan kebenaran adalah wajib.

Didalam Al-Quran, terdapat dalam surat As-Shof ayat 9 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٩

Artinya : “Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk-Nya dan agama yang benar agar dia memenangkan diatas segala-gala agama meskipun orang musrik benci” [QS. As-Shof (28) : 9].

Pada ayat diatas, kalimat *liyudzirahu alad diini kullih* ( agar diperlihatkan dan dimenangkan atas semua agama) menunjukkan bahwa agama Allah SWT, yang mulia ini bersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan atau diperjuangkan oleh para penganutnya. Karena itu *Muzahharah* secara bahasa dapat dikatakan memiliki dasar al- Quran yang kuat berdasarkan ayat ini.<sup>44</sup>

Dari ayat Al-Quran dan hadist yang penulis kumpulkan, ini menunjukkan tentang memperjuangkan kebenaran yaitu kalimat *haq*. Maka dari sini penulis mengambil hukum dengan menggunakan metode Qiyas / analog yaitu, mengambil `illat yang sama dengan demonstrasi hukumannya adalah boleh, bahkan menjadi wajib, bila kondisi tidak memungkinkan lagi,

---

<sup>44</sup>*Ibid* h. 85.

seperti orang yang telah nyata bertindak maksiat.

Pada dasarnya segala macam *muzhaharah* atau demonstrasi yang diniatkan karena Allah SWT, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam adalah salah satu bentuk mengingkari kemungkaran. *Muzhaharah* atau demonstrasi seperti ini memiliki niat urgensi besar dalam menampakkan kekuatan kaum muslimin. *Muzhaharah* untuk membela penderiataan ummat Islam itu lebih spesifik lagi, karena memperlihatkan solidaritas ukhwah kaum muslimin terhadap saudar-saudara mereka yang dizholimi.

Dalam menunjukkan adanya kebebasan berbicara dalam ajaran Islam, sehingga seseorang mengucapkan kata-kata yang benar (*kalimat haq*) tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun. Namun dalam hadist Nabi SAW, tidak menunjukkan secara pasti bentuk mengucapkan kalimat *haq* dihadapan penguasa yang zalim, apakah cukup dilakukan sendirian atau orang banyak, karena itu belaku ketentuan, apabila diungkapkan oleh banyak orang tentu akan lebih baik nilainya dibandingkan dilakukan oleh seorang individu, seperti , Nabi Musa As, ketika menyampaikan kebenaran Islam didepan Fir'aun, memohon kepada Allah SWT, agar ditemani oleh saudaranya Nabi Harun As, beliau bahwa didampingi oleh saudaranya ituperjuangannya akan lebih kokoh, Nabi Harun As, lebih paseh berbicara dihadapan umum dari padanya.

Karena bentuk-bentuk penyampaian kalamat *haq* ini semata merupakan *wasilah* (sarana) yang dapat ditampilkan dalam beraneka ragam cara sesuai dengan semangat zaman. Dengan demikian ber *muzhaharah* atau demonstrasi untuk mengoreksi penguasa tak kala ia melakukan perbuatan



yang merugikan orang lain atau masyarakat banyak juga, yang membuat, hanya merupakan sarana saja. Sementara itu, dalam pandangan syarai`at Islam perintah kepada sesuatu yang wajib merupakan saran untuk mewujudkannya menjadi wajib pula (*al-amru bisya`ien amrun bi-wasaailihi*).<sup>45</sup>

Hukum asal demonstrasi *Muzharrahah* atau demonstrasi adalah mubah alias boleh, *muzarrahah* adalah *Wasilah* (sarana), karena *muzharrahah* mengambil hukum yang dimiliki oleh umumnya *wasilah*, dan hukum asal setiap *wasilah* adalah *ibahah* (boleh) dan segala hal yang mencapuri *wasilah* berupa *mukhallafah* (penyimpangan) maka, *wasilah* itu mengambil hukum yang dimiliki oleh *al-muqasshid* (tujuan). Karena *muzharrahah* itu mengambil hukum *wasilah*, jika *wasilah* itu menyimpang, maka hukum *muzharrahah* akan menyimpang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh *wasilah*.

Adapun yang dimaksud kaum muslimin dengan sasaran dari *wasilah* ini tidak lain adalah menampakkan kebenaran, menolak kezaliman, dan mengungkap kejahatan. Selain itu dengan *muzharrahah* atau demonstrasi kaum muslimin dapat mengasah semangat beramar *ma`ruf* dan *nahi mungkar*, melalui lisan, pena dan tangan mereka sesuai dengan sarana yang mereka miliki dan mereka mampu melakukannya.<sup>38</sup>

*Muzharrahah* atau demonstrasi bersama dalam menentang kebatilan adalah, sunnah syar`i dan masih berlaku sampai sekarang, yang disunnahkan Allah SWT, dalam rangka unjuk pengingkaran terhadap kerusakan.

---

<sup>45</sup>Abdul Mudjid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia), 1996 cet. 11 h. 10-11.

Sedangkan menurut Abdussalam bin Barjas al Abdul Karim mengatakan bahwa *Amar ma`ruf nahi mungkar* merupakan salah satu tiang agama. Diharapkan dengan metodologi seperti itu akan tersosialisasi kebaikan dan segala bentuk kebathilan akan musnah.

Allah mewajibkan kepada umat Muhammad saw., untuk melaksanakan *amar ma`ruf nahi mungkar* sebagaimana firman Allah :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya : “hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma`ruf* dan mencegah dari yang *mungkar*, merekalah orang-orang yang beruntung”. [QS. Al-Imron (3) : 104].

Kata *minkum* pada ayat diatas menunjukkan untuk penjelasan bukan untuk sebagian. Oleh karena itu, wajib bagi ummat ini *beramal ma`ruf dan nahi mungkar*, tetapi kewajibannya hanya fardu kifayah, yang apabila sebahagian ummat telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Demikian yang dipahami oleh Jumhur Ulama.<sup>46</sup>

Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi. Rasulullah saw. bersabda:

<sup>46</sup>Abdussalam Bin Barjas al Abdul Karim, *Etika Mengkritik Penguasa*, (Surabaya; Pustaka Assunnah , 2002) cet. 1 h. 27-28.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ  
يَنْكِحُهَا فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “*Sesungguhnya amal-amal itu terkait dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Maka barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu mendapatkan keridhoan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia, maka akan mendapatkannya, atau karena wanita maka ia akan menikahnya. Maka hijrah itu sesuai dengan niatnya.*” (Muttafaqun alaihi).

Dari dasar hukum diatas, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia, dapat dilihat bahwa hukum demonstrasi adalah boleh dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi bagaimana pola dan bentuk yang dibenarkan oleh Islam, maka bisa dilihat pada keterangan berikut.

Demonstrasi boleh diikuti oleh seorang muslim sepanjang demonstrasi tersebut sesuai dengan tuntunan Islam, yaitu bermamfaat dan tidak menimbulkan kemudaran yang lebih besar bagi masyarakat. Berdemonstrasi dimaksudkan untuk mencari solusi bukan untuk menimbulkan masalah baru atau memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim melakukan demonstrasi dengan landasan asal beda pendapat dengan orang lain atau asal protes karena kertidak setujuannya.

Demonstrasi yang sesuai dengan tuntunan Islam meliputi maksud sebagai berikut :

- 1) Upaya mengagungkan kebenaran dan ajaran Islam.
- 2) Menunjukkan kelemahan yang bathil.
- 3) Menunjukkan solidaritas bagi sesama yang tertindas dan menderita akibat kezaliman penguasa.
- 4) Berpartisipasi untuk mengurangi penderitaan masyarakat umum.
- 5) Menolak diberlakukannya aturan yang zalim ditengah suatu komoditas.
- 6) Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya.

Apapun bentuk-bentuk demonstrasi yang diperbolehkan dalam Islam menurut Shek al Munajjid adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan disaat berlangsungnya demonstrasi.
- 2) Tidak bolehnya berdiri orang demonstan dihadapan kuburan orang kafir atau meletakkan karangan bunga diatas kuburannya.
- 3) Tidak boleh menghinakan diri dengan ungkapan-ungkapan yang merendahkan kaum muslimin.
- 4) Tidak boleh menzhalimi orang lain, seperti menutup jalan dan mematikan lampu lalu lintas.
- 5) Tidak boleh mempergunakan pola caci maki, dan celaan-celaan yang tidak diperbolehkan syari`at.<sup>47</sup>

## **B. Bentuk, Faktor dan Akibat Demonstrasi**

### **1. Bentuk Demonstrasi**

---

<sup>47</sup> *Ibid. h. 71-78.*



Bentuk demonstrasi ada beberapa macam format seperti:

- a) *March* atau berbaris yaitu berbaris dari satu tempat ke tempat lain yang dituju.
- b) *Rally* atau penggalangan orang yaitu sekumpulan orang berkumpul di suatu tempat untuk mendengarkan pembicara.
- c) *Picketing* atau pengepungan yaitu sekeompok massa mengepung suatu tempat tertentu.
- d) *Sit-ins* atau duduk bersama yaitu peserta demo duduk bersama di suatu lokasi untuk waktu tertentu atau tak terbatas sampai tuntutan dipenuhi atau sampai mereka dipaksa meninggalkan tempat.
- e) *Hunger strike* atau mogok makan yaitu peserta demo tidak makan apapun kecuali minum air untuk waktu yang ditentukan atau sampai tuntutan dipenuhi.
- f) *Nudity* atau telanjang. Ini terjadi di negara-negara Barat (Eropa dan Amerika). Demo dilakukan oleh sekelompok perempuan atau pria wanita dengan bertelanjang dada atau telanjang bulat atau mengancam untuk bertelanjang apabila tuntutan tidak dipenuhi.

Menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.*

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:<sup>48</sup>

- 1) unjuk rasa atau demonstrasi;

---

<sup>48</sup>Pasal 9 ayat (1) UU 9/1998

- 2) pawai;
- 3) rapat umum;
- 4) dan atau mimbar bebas.

Jadi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>49</sup>

Penyampaian pendapat di muka umum tersebut dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:<sup>50</sup>

- a) di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.
- b) pada hari besar nasional.

Perlu diketahui, pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.<sup>51</sup>

Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok. Pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Pemberitahuan

---

<sup>49</sup>Pasal 1 angka 3 UU 9/1998

<sup>50</sup>Pasal 9 ayat (2) UU 9/1998

<sup>51</sup>Pasal 9 ayat (3) UU 9/1998

secara tertulis ini tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.<sup>52</sup>

Surat pemberitahuan tersebut memuat:<sup>53</sup> maksud dan tujuan, tempat, lokasi, rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan, dan/atau jumlah peserta.

Penanggungjawab kehiatan demonstrasi wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjukrasa atau demonstrasi dan pawai, harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab.<sup>54</sup>

Meskipun demonstrasi diperbolehkan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, namun ada beberapa jenis demo yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang tatacara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara.

Adapun penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 7/2012), beberapa di antaranya yaitu:

1. Demo yang Menyatakan Permusuhan.

Kebencian atau Penghina, dilarang melakukan demo dengan cara:<sup>55</sup> menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia; mengeluarkan perasaan atau

---

<sup>52</sup>Pasal 10 UU 9/1998

<sup>53</sup>Pasal 11 UU 9/1998

<sup>54</sup>Pasal 12 UU 9/1998

<sup>55</sup>Pasal 8 huruf d - h Perkapolri 7/2012

melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia; lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan; menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan.

## 2. Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan

Tak hanya di lingkungan istana Kepresidenan dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar, aksi demo juga dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, obyek-obyek vital nasional, dan instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar.<sup>56</sup>

## 3. Demo di Luar Waktu yang Ditentukan

Aksi demo hanya dapat dilakukan pada tempat dan waktu sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00 waktu setempat.

---

<sup>56</sup>Pasal 7 ayat (3) Perkapolri 7/2012

<sup>57</sup>Pasal 7 ayat (1) Perkapolri 7/2012



- b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.

4. Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis Kepada Polri.

Demo wajib diberitahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya, sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Mabes Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;
- b. Polda, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;
- c. Polres, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan
- d. Polsek, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.
- e. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Pasal 10 Perkapolri 7/2012

<sup>59</sup>Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perkapolri 7/2012

## 5. Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan.

Peserta demo dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum. Selain itu, juga dilarang mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan/atau barang.<sup>60</sup>

Sanksi Bagi Pihak yang Menghalangi Penyampaian Pendapat, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU 9/1998, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>61</sup>

## 2. Faktor Demonstrasi

Kegiatan aksi unjuk rasa tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Mengacu pada pengertian demonstrasi, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi, diantaranya:<sup>62</sup>

### 1. Ketidakadilan Sosial

Isu ketidakadilan sosial seringkali menjadi penyebab timbulnya gesekan di masyarakat yang berujung pada aksi unjuk rasa. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan sosial berkumpul untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya. Dengan melakukan aksi ini para demonstran menuntun dan berharap akan mendapatkan keadilan yang lebih merata.

---

<sup>60</sup>Pasal 8 huruf v dan au Perkapolri 7/2012

<sup>61</sup>Pasal 18 ayat (1) UU 9/1998

## 2. Ketidaksesuaian Pendapat

Perbedaan pendapat yang sangat bertolak belakang antar masing-masing pihak dapat menyebabkan timbulnya aksi unjuk rasa. Demonstrasi dianggap dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi sehingga dengan aksi demonstrasi diharapkan dapat menampung pendapat hingga tercapai tujuan bersama.

## 3. Aspirasi Masyarakat yang Belum Terpenuhi

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk aksi masyarakat dalam memantau kinerja para pengelola negara. Dengan adanya demonstrasi akan membuat para pengelola negara lebih sigap dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kegiatan unjuk rasa merupakan salah satu praktik demokrasi di suatu negara. Untuk memperlancar jalannya aksi demonstrasi maka diperlukan beberapa faktor pendukung, diantaranya;

### 1. Masyarakat Sipil

Aksi demonstrasi merupakan wujud protes kekecewaan yang dilakukan oleh kelompok menengah ke atas dan menengah ke bawah yang kecewa dengan perlakuan atasannya. Kelompok yang dikenal dengan masyarakat sipil ini biasanya memiliki kemampuan menggiring opini publik.

### 2. Dukungan

Pihak penguasa dapat ditekan oleh aksi demonstrasi dengan menggunakan tiga elemen yang dibutuhkan. Elemen tersebut adalah

dukungan jaringan, dukungan militer dan dukungan uang. Ketiga elemen tersebut sangat penting dalam melancarkan aksi demonstrasi.

### 3. Isu/ Tema

Aksi demonstrasi biasanya dilatarbelakangi oleh isu atau masalah tertentu. Tema yang paling umum adalah kondisi psikologis masyarakat yang berkaitan dengan masalah keadilan sosial, HAM, dan harga diri.

### 4. Media dan Pers

Keberadaan media dan pers sangat membantu dalam pelaksanaan aksi demonstrasi. Demonstrasi yang terjadi di beberapa tempat biasanya akan diliput oleh pencari berita dan hingga akhirnya disebarkan kemana-mana, seperti melalui siaran televisi, berita online atau media cetak.

Sebelum melaksanakan demonstrasi tentu harus membuat pemberitahuan secara tertulis kepada polisi setempat agar tidak mengganggu keamanan dan kegiatan warga lainnya. Dan, ada baiknya bila demonstrasi dilakukan secara damai dan tertib.

## 3. Akibat Demonstrasi

Setiap kali ada aksi unjuk rasa tentu akan ada akibat yang bisa terjadi bagi semua pihak, baik terhadap demonstran maupun pihak yang didemo.



Sesuai dengan pengertian demonstrasi, adapun beberapa akibat demonstrasi adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Aspirasi atau Tuntutan Dikabulkan

Pada dasarnya para demonstran ingin agar aspirasi atau tuntutan mereka didengarkan dan dikabulkan. Ini akibat yang bisa saja terjadi setelah terjadi demonstrasi dengan gelombang besar. Namun, tentu saja tidak semua aspirasi dan tuntutan para demonstran dapat dikabulkan karena berbagai pertimbangan.

2. Terjadi Kerusuhan

Tidak dapat dipungkiri bahwa aksi unjuk rasa seringkali berujung pada kerusuhan, khususnya demonstrasi yang berhubungan dengan politik. Jumlah demonstran yang sangat banyak berpotensi untuk disusupi oleh oknum provokator sehingga memicu terjadinya kerusuhan.

3. Terjadi Kerusakan Fasilitas Umum

Demonstrasi dengan jumlah besar dan tidak terkoordinir seringkali berakhir dengan kerusuhan yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum.

4. Menghambat Perekonomian

Seringkali aksi unjuk rasa yang anarkis akan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara secara umum. Kerusuhan dan ketidakstabilan keamanan akibat demonstrasi juga dapat mengakibatkan merosotnya indeks saham dan nilai mata uang suatu negara.

---

<sup>63</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-demonstrasi.html>  
Desember 2019, 16:07)

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Aziz bin Baz, Abdul. dkk. (2003) *Fatwa-Fatwa Terkini*, penerjemah Musthafa, dkk, Jakarta: Darul Haq, Jilid 1.
- Aziz Dahlan, Abdul. (1996) *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve.
- Aziz bin Baz, Abdul. Abdul Aziz bin Abdullah. 2007. *Fatawa Nur 'ala Ad-Darb*. Juz 19. Cet.1. Riyadh: Majallat Al-Buhuts Al-Islamiyyah.
- Aziz bin Baaz, Abdul. (2013) *Jilid 7 Fatwa dan Maqolat Syaikh ,Bab Ar-Rabithah Islamiyyah Hiya A'dhamul Wasail Allati Tarbithu Bainal Muslimin*.
- Aziz bin Muhammad as-Sadha. Abdul. (2016) *Biografi Abdul Aziz bin Baz*, Penerjemah , Nugraha Waluya, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, cet ke-2.
- Abdul Majid Khon. (2015) *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, Jakarta: AMZAH.
- Abdul Mudjid. (1996) *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, cet.11.
- Abdurrahman 'Umairah. (2010) *The Great Knight Kesatria Pilihan di sekitar Rasulullah*, terjemahan Badruddin, Muhyidin, Jakarta: Embun Litera.
- Abdussalam Bin Barjas al Abdul Karim. (2002) *Etika Mengkritik Penguasa*, Surabaya; Pustaka Assunnah.
- Abu Ubaidah Yusuf. (2009) *Demonstrasi Solusi Atau Polusi* , Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Aus Hidayat. (2002) *Fiqh Demonstrasi kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa dalam Pandangan Islam*, Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna, cet I.
- Badri yatim. (1984) *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 30, mengutip Fazlur Rahman, *Islam* , Bandung: Penerbit Pustaka.
- Budiman Tanuredjo. (1991) *Pasung Kebebasan: Menelisik Kelahiran Undang undang Unjuk Rasa*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Bunyana Solihin.(2016) *Kaidah hukum Islam didalam tertib demonstrasi* Yogyakarta:Kreasi total media.

Dahlan, Abd. Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*. Cet. 4. Jakarta: Amzah.

Dede Rosyada, et. al.(2003), *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media.

Departemen Agama RI. (2004) *Al Quran dan Terjemahannya* Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J ART).

Djalinus Syah, Azimar Enong dan Mulfaydes.(1993) *Kamus Inggris Indonesia* , Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Dr. Hudzaifah Abud Mahdi As-Samirai Mudzaharah Sya'biyah, *Tahdzir Asy Syabab min Fitnah al-Khuru'j wa al-Mudzaharat wal-Irhab* Muhammad binNashir al-Uroini.

Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian. (2008) *Mencintai Bangsa danNegara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama.

Ibnu Hajar Al-Asqalani.(1999) *Bulughul Maram*, cet.23, terjemahan A. Hassan Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicetak Oleh: CV. Pustaka Assalam.

Isbom Talimah. (2001) *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar.

Iqbal Muhammad. (2014) *Fiqh siyasah, kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Kencana.

Mariam Budiarjo. (2008) *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mu'ammarr, M. Arfan. Hasan, Abdul Wahid. dkk.. 2017. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider*. Cet. 1. Yogyakarta: IRCISod.

Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. (1997) *Fathul Qadir*, Darul Ma'rifah, Beirut, juz 1, cet-3.

Mudzaharah Sya'biyah, Dr. Hudzaifah Abud Mahdi As-Samirai. *Tahdzir Asy Syabab min Fitnah al-Khuru'j wa al-Mudzaharat wal-Irhab* Muhammad bin Nashir al-Uroini.

Novel Ali.(1999) *Peradaban Komunikasin Politik* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sarlito Wirawan. S. (1978) *Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam gerakan protes mahasiswa* , Jakarta: Bulan Bintang.

Susiadi AS. (2015) *Metode Penelitian* Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Winarno Surakhmad. (1990) *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito.

Qaradawi, Yusuf. (2003) *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Qaradawi, Yusuf. (1996) *Huda Al-Islam Fatawa Mu'assirah*, Penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti.

Qaradawi, Yusuf. (1987) *Pasang surut Gerakan Islam*, alih bahasa Faruq Ubah, Jakarta: Media Dakwah.

Qaradawi, Yusuf. Fatwa Qardhawi. (1994) *Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya : Risalah Gusti.

Qaradawi, Yusuf . 1987. *Al-Ijtihad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadzharatin Tahliliyyain fi Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Ahmad Syatori. Jakarta: Bulan Bintang.

#### **Sumber jurnal :**

Agustinova Danu Eko, *Latar belakang dan masa depan libya pasca arab spring*, (Yogyakarta: Jurnal, 2013), Vol. 10, No. 2, hal. 121 (On-line), tersedia di: <https://journal.uny.ac.id> (15 Desember 2019, 16:03), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Media tim Hidayatullah, *Biografi singkat Yusuf Qardhawi*. Media homepage, html, diakses pada 01 Januari 2020.

majalah *buhuts al islamiyyah*



### Sumber skripsi :

Amin Farih, *Analisis Pemikiran Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istibat Hukum)*, Fakultas Tarbiah dan Keguruan

Oleh H Haryanto, *Metode Demonstrasi* (Skripsi yang dibuat tentang Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi..., yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011), h.1. (On-line), tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/2426/> (14 Desember 2019, 21:24), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Muhammad Anwar, *Demonstrasi Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)* (skripsi yang dibuat untuk memenuhi salahsatu syarat memperoleh gelar S1 yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 20 juni 2014), h. 18.(Online), tersedia di:<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24870>(14desember 2019, 10:01), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### Sumber Internet :

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-demonstrasi.html>

(15Desember 2019, 16:07)

[http://, asysyariah.com, biografi-as-y-syaikh-abdul-aziz-bin-baz](http://asysyariah.com/biografi-as-y-syaikh-abdul-aziz-bin-baz),(20 Desember 2019 , 11:00)

<http://biografi-Syaik-Abdul-Aziz-bin-Abdullah-bin-Baz>, (26 Desember 2019, pukul,09:00)

<https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi> (23 november 2019 ,19:45)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdul\\_Aziz\\_bin\\_Abdullah\\_bin\\_Baz](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz) (06 desember 2019 , 19:02)

<http://www.qaradawi.net/> (23 november 2019 ,12:00)

<http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/285042>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdul-Aziz-bin-Abdullah-bin-Baz#Murud-muridnya> ( 26 Desember 2019 Pukul 10:00)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24870> (14 desember 2019, 10:01).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul\\_Aziz\\_bin\\_Abdullah\\_Alu\\_Syaikh#Pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_Alu_Syaikh#Pendidikan) (20 Februari 2020 Pukul 17:16).

